



2025

RENJA

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kebijakan ...

20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II
KEDUDUKAN DAN MUATAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- (3) Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

Pasal 5

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
 - c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- c. penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
- (4) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


SURYANTO PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun dengan beberapa tahapan, meliputi: Persiapan Penyusunan Renja; Penyusunan Rancangan Awal Renja; Penyusunan Rancangan Renja; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan Penetapan Renja. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Lalu,

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penutup. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja khususnya Bappenda sehingga dapat mendorong terwujudnya Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor serta program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

Cibinong, 2024



ANDRI HADIAN
Pembina Tingkat I
NIP. 197406022002121006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Landasan Hukum 5
1.3.	Maksud dan Tujuan 11
1.4.	Sistematika Penulisan 12
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 16
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 131
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 135
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 138
2.5.	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 201 Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN III-1 DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 203
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 209
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 212
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 217
BAB V	PENUTUP 252

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	18
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2021	133
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bogor	141
Tabel 2.5	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bogor	202
Tabel 3.1	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	205
Tabel 3.2	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023	207
Tabel 3.3	Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional	208
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023	211
Tabel 3.5	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	216
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	218

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, ataupun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026.

Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama, baik dalam periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, maupun periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, yang penyusunannya dilakukan secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Proses sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, tidak hanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan keuangan di Kabupaten Bogor, tapi juga bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumusan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja serta sumber pendanaan, yang tertuang dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini, diharapkan telah bersinergi dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat Kabupaten Bogor, maupun antar tingkatan pemerintahan.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 menjadi dokumen perencanaan tahunan yang strategis, mengingat dalam penyusunannya selain bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, juga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang disusun sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana pemilihannya akan dilaksanakan pada Bulan Bovember 2024 mendatang.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta tercantum dalam SIPD-RI.

Secara teknis, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tetap mengacu pada ketentuan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daereah Tahun 2025 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Persiapan Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2025 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan Rancangan Renja Tahun 2025 disajikan dengan sistematika:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun secara rutin oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan konkuren perangkat daerah berdasarkan bidang urusan/unsur. Renja Perangkat daerah disusun secara simultan bersama dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam substansi RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib terintegrasi dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025. RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 menjadi pedoman bagi KUA-PPAS, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RAPBD tidak boleh berbeda dengan program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Selain itu, RKA SKPD disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang telah disepakati Kepala Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Renja juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL), yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sementara itu, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memuat maksud dan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi

kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Tahun 2024-2026 yang berfokus untuk mendukung prioritas Pembangunan. Renja juga keterkaitan dengan Renstra Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
38. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor);
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
 48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101) ;
 49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26) ;
 50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12) ;
 51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23) ;
 52. Peraturan Bupati Bogor Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor ...) ;
 53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 17) .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2025;

2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2025;
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen yang terdapat pada masing-masing bab.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bab ini memuat :

- Capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2023. Dalam hal ini, untuk capaian akhir tahun Perangkat Daerah menghitung capaian kinerja hingga akhir Desember 2023. Disamping itu, data yang harus disajikan dalam dokumen adalah indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercapai, terlampaui, dan tidak tercapai. Jika terlampaui dan tidak tercapai, wajib menyertakan alasan. Untuk target yang tidak tercapai, wajib menyertakan upaya yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menginformasikan pencapaian kinerja perangkat daerah, dengan rincian :

- Penjelasan naratif ketercapaian IKU tujuan dan sasaran (impact) tahun 2023 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian IKU (tujuan dan sasaran) tahun 2023 terhadap capaian tahun 2022, jika memiliki IKU yang sama.
- Penjelasan naratif ketercapaian target program (outcome) tahun 2023 antara target dengan capaian.
- Penjelasan naratif peningkatan, penurunan, atau tetapnya capaian outcome tahun 2023 terhadap capaian tahun 2022 jika memiliki outcome yang sama.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bagian ini mengulas/menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Dalam hal ini, menguraikan kinerja program yang perlu ditingkatkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, karena belum mencapai target.
- Uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam hal ini uraikan rumusan permasalahan dalam bentuk poin.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam hal ini, uraikan poin isu strategis perangkat daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program/kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, seperti perangkat daerah perbatasan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisi telaahan keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Barat dengan kewenangan (perangkat daerah), dengan memedomani program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2024-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah beserta indikatornya sebagaimana telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sub bagian ini menjelaskan kondisi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendukung dilaksanakannya program, kegiatan dan sub kegiatan, seperti : a. Pencapaian SDGs, b. Pengentasan kemiskinan, c. Pencapaian NSPK dan SPM, d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, e. Pengembangan daerah terisolir, dan faktor lainnya.
2. Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Menjelaskan dan menguraikan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan :

- a. Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 (untuk Rancangan Awal gunakan Rancangan Renstra Tahun 2024-2026)
- b. RKPD Tahun 2025 (Renja PD memedomani substansi sebagaimana tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024)

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun anggaran 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 91,66% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Uraian capaian kinerja IKU adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio PAD, dari target sebesar 47,21% terealisasi sebesar 41,72% atau capaian kinerja sebesar 88,37%;
- 2) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dari target sebesar 47,37% terealisasi sebesar 41,72% atau capaian kinerja sebesar 88,07%.
- 3) Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dari target 69,59% terealisasi sebesar 68,57% atau capaian kinerja sebesar 98,53%;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari 1 program utama, 1 kegiatan, dan 15 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebanyak 15 sub kegiatan;
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - f. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

- g. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- i. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- j. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- k. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
- l. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- m. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- n. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- o. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 188.334.017.492,00 atau 98,42% dari target sebesar Rp. 191.363.717.464,00. Pada bagian ini diuraikan materi terkait : 1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel 2.1 dibawah ini.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

URUSAN / UNSUR
 BIDANG URUSAN
 PERANGKAT DAERAH

: PENUNJANG
: KEUANGAN
: BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2019															
30	03	2				Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah	Rupiah	8.137.969.867.680						
30	03	2	0001			Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen	2						
30	03	2	0002			Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen	2						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2				Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Penerimaan Dana Transfer	Rupiah	4.976.8 23.958. 308						
30	03	2	000 1			Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen	12						
30	03	2				Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	2.676.3 64.947. 000						
30	03	2	000 1			Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Draft produk hukum	13						
30	03	2	000 2			Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang	550						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	Media Elektronik	3						
							Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Buah	7.724						
							Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Orang	1.500						
30	03	2	000			Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen	19						
							Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen	2						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	12						
							Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	Dokumen	12						
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Dokumen	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	Rupiah	766.32 0.824.0 00						
							Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar	Rupiah	554.49 9.000						
							Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak	4.863						
30	03	2	000			Intensifikasi Sumber- Sumber Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak	75						
30	03	2	000			Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan ekstensifikasi	Wajib Pajak	508						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani	Wajib Pajak	499						
30	03	2	000			Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD	44.590						
30	03	2	000			Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset yang diterima	Wajib Pajak	37						
30	03	2	000			Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah	18.229						
30	03	2	000			Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terbit dan terdistribusi	Dokumen	21.021						
30	03	2	000			Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang membayar	Rupiah	32.191.401.073						
30	03	2				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2		572.271.543.387						
							Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar		40.783.961.867						
							Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (Collection Ratio)		50						
30	03	2	000			Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan	1						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Objek Pajak	20.412						
30	03	2	000			Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Desa yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan	6						
							Jumlah Dokumen analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	Dokumen	3						
30	03	2	000			Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak	2.035						
							Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan	40						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan	40						
							Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	Objek Pajak	200						
30	03	2	000			Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan	1						
							Jumlah Dokumen Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Dokumen	3						
30	03	2	000			Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang terekam	Objek Pajak	1.896.0 33						
							Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	Kecamatan	40						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loker PBB P2 terlayani	Wajib Pajak	121.345						
30	03	2	000			Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang Tertata	Berkas	119.760						
30	03	2	000			Penetapan dan Pencetakan Dokumen PBB P2	Jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan di cetak	Objek Pajak	1.927.712						
30	03	2	001			Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	SPPT	1.812.113						
30	03	2	001			Penagihan PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	NOP	746.182						
							Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2 terbayar	Rupiah	139.288.437.430						
30	03	2	001			Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	NOP	1.108.975						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Penerimaan PBB P2 dari pelayanan mobil keliling	Rupiah	209.48 8.165.6 07						
30	03	2 5	001 3			Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, dan Pembebasan PBB P2	Jumlah berkas permohonan wajib pajak yang tertangani	Berkas	8.776						
30	03	2 5	001 4			Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Dokumen	12						
30	03	2 6				Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah	594.82 2.500.0 00						
30	03	2 6	000 1			Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	Perumahan	239						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	2	000			Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	Laporan	12						
30	03	2	000			Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSPD Yang Terverifikasi	SSPD	58.700						
30	03	2	000			Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	Berkas	58.700						
30	03	2	000			Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB	Laporan	12						
30	03	2	000			Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
30	03	0	000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12						
30	03	0	000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	Unit	195						
30	03	0	000			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	14						
							Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibayarkan	Bulan	12						
							Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis	31						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	000			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang	7						
							Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan	12						
							Jumlah tenaga ahli pemeliharaan sistem pajak daerah yang terbiayai	Orang	3						
30	03	0	002			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	28						
30	03	0	002			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia	Lembar	330.00 0						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Lembar Penggandaan yang tersedia	Jenis	21						
30	03	0	002			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	13						
30	03	0	002			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan	12						
30	03	0	002			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis	6						
30	03	0	002			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan minum yang tersedia	Orang	23.750						
30	03	0	002			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibayarkan	Bulan	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	004			Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Dokumen	100.000						
30	03	0	004			Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12						
							Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	6						
30	03	0	004			Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	Dokumen	12						
30	03	0	004			Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan	12						
							Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	Orang	42						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	008			Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah Gedung Kantor UPT yang dibiayai sewa tempat	Gedung	8						
30	03	0				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
30	03	0	001			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung UPT yang dibangun	Gedung	-						
							Jumlah lift yang tersedia	Unit	-						
30	03	0	004			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis	8						
								Unit	57						
30	03	0	004			Pengadaan Insatalasi Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Jaringan listrik, air dan komunikasi yang tersedia	Gedung	-						
30	03	0	010			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah GedungKantor yang terpelihara	Jenis	5						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
								Lantai	3						
30	03	0	010			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Jumlah Taman Halaman Kantor yang terpelihara	Jenis	3						
30	03	0	011			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	137						
30	03	0	011			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis	6						
30	03	0				Program Peningkatan Displin Aparatur									
30	03	0	000			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Stel	1.500						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	4			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
30	03	0	000	1		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah orang sumber daya aparatur BAPPENDA yang meningkat kemampuannya	Orang	450						
30	03	0	000	3		Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang	5.200						
30	03	0	5			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	000			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Dokumen	33						
30	03	0	000			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bappenda	Dokumen	1						
30	03	0	000			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappenda	Dokumen	1						
30	03	0	000			Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Dokumen	12						
30	03	0	000			Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen	48						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	000			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda	Dokumen	16						
30	03	0	000			Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Kinerja	Media	20						
							Jumlah Sosialisasi pada media massa	Kali	130						
30	03	0	000			Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bappenda Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019	Dokumen	4						
30	03	0	000			Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	Dokumen	2						
2020															
30	03	3				Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah		##### ##### #					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen		17					
30	03	3	000			Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen		6					
30	03	3				Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Presentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Rupiah							
30	03	3	000			Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen		12					
30	03	3				Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Dokumen		10					
							Jumlah rupiah Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah		2.827.923.538.176					
30	03	3	000			Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang		249					
30	03	3	000			Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	Media Elektronik		3					
							Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Orang		1.753					
							Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Media Cetak		3.209					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah : Dokumen laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Dokumen		12					
							Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah untuk 10 Jenis Pajak Daerah dan 2 Retribusi Daerah	Dokumen		2					
30	03	3	000			Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen		12					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	Dokumen		12					
30	03	3	000			Pengelolaan Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Bulan		12					
30	03	3				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	Rupiah		622.44 7.196.0 00					
							Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar	Rupiah		33.775. 911.20 4					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak		3.078					
30	03	3	000			Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi	Wajib Pajak		455					
30	03	3	000			Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang dapat dilayani	Wajib Pajak		534					
30	03	3	000			Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD		38.554					
30	03	3	000			Intensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak		97					
30	03	3	000			Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang akan diperiksa	Wajib Pajak		-					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah		11.090					
30	03	3	000			Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang tersedia	Dokumen		12.592					
30	03	3	000			Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen		12					
30	03	3	000			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang berbayar	Rupiah		32.191. 401.07 3					
30	03	3				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar	Rupiah							
							Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (Collection Ratio)	Persentase							
30	03	3	000			Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan		2					
								Objek Pajak		53.598					
30	03	3	000			Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Kecamatan yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan		20					
							Jumlah Objek Pajak analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	Objek Pajak		400					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Verifikasi Obyek Pajak PBB P2	Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan		40					
							Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak		1.500					
30	03	3	000			Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan		40					
							Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	Objek Pajak		152					
30	03	3	000			Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan		1					
							Jumlah Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Objek Pajak		7.827					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang dilakukan Penetapan Pajak	Objek Pajak		98.436					
							Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	Kecamatan		40					
30	03	3	000			Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak dan ditetapkan	SPPT PBB		1.910.165					
30	03	3	000			Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loker PBB P2 terlayani	Wajib Pajak		102.296					
30	03	3	000			Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Pemohon Layanan Berkas administrasi PBB P2 yang terkelola	Berkas		170.474					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	001			Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah Dana Penerimaan PBB P2 Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling yang terrealisasi	Rupiah		##### ##### #					
							Jumlah NOP Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 yang terrealisasi	NOP		1.016.0 97					
30	03	3	001			Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Kecamatan		40					
							Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Dokumen		12					
30	03	3	001			Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2	Jumlah Ketetapan SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	SPPT PBB		1.812.1 13					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	001			Penagihan PBB P2	Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2	Rupiah		116.39 2.774.270					
							Jumlah NOP Penerimaan Piutang PBB P2	NOP		905.094					
30	03	3	001			Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan dan Pembebasan PBB P2	Jumlah data Wajib Pajak yang tertangani keberatan, pengurangan pembetulan PBB P2	Wajib Pajak		5.275					
30	03	3				Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah							
30	03	3	000			Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	Perumahan		115					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	Laporan		12					
30	03	3	000			Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSPD Yang Terverifikasi	Berkas		34.125					
30	03	3	000			Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	Berkas		34.125					
30	03	3	000			Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaks BPHTB	Laporan		12					
30	03	3	000			Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan		12					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A									
30	03	3	000 1			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja per bulan	%		87					
30	03	3	000 2			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri per bulan	%		97					
30	03	3	000 3			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol per bulan	%		92					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung per bulan	%		103					
30	03	3	000			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi per bulan	%		102					
30	03	3	000			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin per bulan	%		89					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	000			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup per bulan	%		95					
30	03	3	000			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas per bulan	%		112					
30	03	3	000			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg per bulan	%		85					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	3	001			Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang per bulan	%		86					
30	03	0				Program Pelayanan Adminitrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah									
30	03	0	000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan		12					
30	03	0	000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis		5					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	000			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan rapat dan tamu makan minum yang tersedia	Porsi		6.900					
30	03	0	005			Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen		12					
30	03	0	005			Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Jenis rekening		4					
30	03	0	005			Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah orang pelayanan jasa keamanan kantor	Orang		12					
30	03	0	005			Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis rekening		2					
30	03	0	005			Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit		3					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	020			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis rekening		10					
30	03	0	020			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Perengkapan Gedung kantor yang tersedia	Jenis rekening		4					
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor									
30	03	0	025			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Gedung		2					
30	03	0	035			Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Jumlah Jenis Kantor yang terpelihara	Jenis		1					
30	03	0	035			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit		50					
30	03	0	035			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis rekening		1					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	035			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	Jenis rekening		4					
30	03	0	035			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi yang terpelihara	Jenis rekening		2					
30	03	0	045			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jenis rekening		4					
30	03	0	090			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis rekening		11					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	0901			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis rekening		9					
30	03	01	0902			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis rekening		11					
30	03	01	0903			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis rekening		11					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	090			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis rekening		11					
30	03	0	090			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis rekening		11					
30	03	0	090			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis rekening		10					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	0907			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis rekening		12					
30	03	01	0908			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis rekening		11					
30	03	01	0909			Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis rekening		11					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	100			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang		7					
							Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan		12					
30	03	0	100			Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang		100					
							Jumlah Bulan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Bulan		12					
30	03	0	100			Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Pramuka yang tersedia	Stel		200					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	01	1003			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen		6					
							Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan		12					
30	03	01	1004			Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		100					
							Jumlah Bulan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Bulan		12					
30	03	01	2001			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bappenda	Dokumen		3					
30	03	01	2002			Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Jenis rekening		5					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
30	03	0	200			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Jenis rekening		4					
30	03	0	200			Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Jenis rekening		4					
30	03	0	200			Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis rekening		3					
30	03	0	200			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Bappenda	Jenis rekening		5					
30	03	0	200			Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Kinerja	Jenis rekening		5					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Sosialisasi media massa	Bulan		12					
2021, 2022, dan 2023															
5	0	0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%			100	91,61	100	98,22	
5	0	0	2.0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen			41	41			
							Tersedianya Pedoman Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			41	41	18	18	100
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali			2	1			

KODE						PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen			3	3			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4	4	100
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen			1	1			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2024)	Dokumen					1	1	100
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	1	100
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen			1	1			
							Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen			1	1			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					2	2	100
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen			1	1			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					2	2	100
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Sakip)	Dokumen			4	4			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					4	4	100
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (Evkin Triwulanan) Perangkat Daerah	Dokumen			4	4			
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen			24	24			
							Jumlah Publikasi Kinerja	Kali			136	147			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	4	100
5	0	0	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen			1.167	1.167			#DIV/0!
							Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%			100	100			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan perangkat daerah	Orang			210	210			
							Jumlah bulan gaji dan tunjangan yang diperoleh	Bulan			12	12			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					183	183	100
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan verifikasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen			1.100	1.100			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1100	1100	100
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen			14	14			
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					14	14	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun	Dokumen			1	1			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	1	100
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen			3		3	3	100
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan yang disusun	Dokumen			48	48			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						48	48	100
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis perangkat daerah yang tersusun	Dokumen			1	1			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
5	0	0	2.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen			12	12			
							Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%			90	100			
					01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			110	544			
							Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang			420				
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						4	4	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang			220	276	496	496	100
					03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang			7	7			
							Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis yang tersedia	Bulan			12	12			
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						24	26	108,333333
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Sistem			5	5			

KODE						PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						4	4	100
					05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen			12	12	12	12	100
					09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan				-	12			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						399	399	100
					10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan peraturan yang disosialisasikan	Bulan			12	240			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						185	185	100
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	Kali			1	1			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						200	200	100
5	0	0	2.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan			10	10			
							Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%			100	100			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik Yang Tersedia	Jenis			3	4			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	1	100
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis			25	5	30	30	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			37	18	55	55	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			16	16	32	32	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			18	23	41	41	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			7	5	12	12	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			36	22	58	58	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			20	28	48	48	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			20	19	39	39	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			34	22	56	56	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			13	21	34	34	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis			14	35	49	49	100
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			2	12	14	14	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			34	16	50	50	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			17	13	30	30	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			17	19	36	36	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			22	16	38	38	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			22	16	38	38	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			11	18	29	29	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			21	19	40	40	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			16	16	32	32	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			15	19	34	34	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Luwiliang	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis			19	20	39	39	100
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis			5	5	10	10	100
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia	Jenis			10	4	14	14	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar			12.900	14.900	27800	27800	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis			1	1	2	2	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar			1	17.500	17501	17501	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis			1	1	2	2	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis			1	1	2	2	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis			1	1	2	2	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis			1	1	2	2	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis			1	1	2	2	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar			1	13.500	13501	13501	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar			13.250	117.500	130750	130750	100
							Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan			12	12	24	24	100
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi yang diberikan makanan dan minuman	Porsi			13.255	3.625	16.625	16.625	100
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			11	11	18	18	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	23	23	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			12	12	24	24	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan			11	11	23	23	100
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD	Jenis			46	4	50	50	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pendukung berbasis elektronik pada SKPD	Sistem			1		1	1	100
5	0	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%			97	100			
					01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan operasional sebanyak	Unit			6		6	6	100
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit			12		16	120	750
					07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis			2		4	2	50

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan gedung kantor	Jenis			1	1			
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor								
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung			1	1	1	1	100
5	0	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	%			96	100			
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan			12	12			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah jenis rekening yang dibayarkan	Jenis			4	4	4	4	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan			12	12	12	12	100
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis							
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis			2	2			
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan			12	12			
							Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang			67	27			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			5	5			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	12			
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang			4	4			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						2	2	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A						12	12	100
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Layanan			6	6			
							Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%			83	86			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit			140	12	8	8	100
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit			100	72			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					140	140	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis			1	4			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					559	559	100
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	Jenis			12	1			
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit					1	1	100
						Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibayarkan	Bulan			3	1			
							Jumlah Gedung Penunjang Kantor yang terpelihara	Jenis			3	3			
							Jumlah Gedung Utama Kantor yang terpelihara	Gedung			1	1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah penunjang gedung kantor yang terpelihara (Halaman Kantor)	Jenis			2	2			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Unit					4	4	100
						Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jenis			-	1			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Unit					6	3	50

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	%			114	103			
							Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%			14	1			
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Target Pendapatan Daerah	Rupiah			##### #####				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen				4	4	4	100
						Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah dan Target Pendapatan	Dokumen			14	16	15	15	100
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pajak Daerah	Dokumen			22	29	4	4	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Sosialisasi Cetak	Buah			6.477	3.322			
							Jumlah Media Sosialisasi Elektronik	Media			3	3			
							Jumlah Media Sosialisasi Tatap Muka	Orang			788	618			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						4	4	100
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jaringan			1	1			
							Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi			5	3			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit					3	3	100
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata				6.310				
							Jumlah Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Obyek Pajak			58.181	94.839			
							Jumlah Perumahan yang didata	Perumahan			80	68			
							Jumlah Wajib Pajak Daerah yang didata	SPTPD			31.708	43.565			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Wajib Pajak			103.522	105.866			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Wajib Pajak			110.756	113.890			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Wajib Pajak			270.998	136.252			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Wajib Pajak			152.588	271.914			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Wajib Pajak			59.962	60.000			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Wajib Pajak			350	376			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Wajib Pajak			295.735	288			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Wajib Pajak			157.889	166.649			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Wajib Pajak			186.000	183.309			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Wajib pajak yang di data di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Wajib Pajak			176.000	170.414			
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					5	5	100
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A						2	2	100
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah				12	10.000			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah	Objek Pajak			7.000				
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan					5	5	100
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa yang Dinilai Ketetapan nya	Desa			68	85			
							Jumlah Obyek Pajak PBB yang dinilai	Obyek Pajak			115	100			
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak					70	83	118,571429

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Berkas			12	2.030.945			
							Jumlah Laporan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen			1.960.000	12	12	12	100
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan pelayanan	Berkas Pelayanan			177.228	190.767			
							Jumlah wajib pajak permohonan pelayanan	Wajib Pajak			204.673	249.263			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Orang			1.000	4.800			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Dokumen			1.000	1.200			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Orang			1.425	2.400			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Dokumen			1.500	2.000			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Orang			2.000	2.100			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Dokumen			2.400	1.150			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Orang			1.200	1.200			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Dokumen			1.680	1.680			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Orang			3.600	3.600			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Dokumen			4.000	4.000			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Orang			1.110	210			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Dokumen			550	101			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Orang			1.500	1.644			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Dokumen			1.500	1.644			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Orang			1.450	850			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Dokumen			1.200	1.047			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Orang			325	1.400			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Dokumen			526	970			
							Jumlah orang yang melakukan konsultasi pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Orang			1.365	6.300			
							Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerja UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Dokumen			800	2.400			
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan					175000	231562	132,321143

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan					4800	4800	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan					2400	2400	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan					2100	2100	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan					1680	1680	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan					3600	3600	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan					210	210	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan					1644	1644	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan					850	850	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan					1400	1400	100
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan					6300	6300	100
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan yang divalidasi	Berkas			67.246	60.960			
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen					60000	60896	101,493333

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	Rupiah			194.058.645.778	181.775.852.330			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Wajib Pajak			30.360	15.699			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Wajib Pajak			111.112	56.945			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Wajib Pajak			57.966	68.126			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Wajib Pajak			2.296	120			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Wajib Pajak			1.187	812			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Wajib Pajak			111.220	60.573			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Wajib Pajak			110.200	1.215			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Wajib Pajak			159.045	54.755			
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Wajib Pajak			18.360	5.369			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Penagihan Pajak Daerah UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya pada UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Wajib Pajak			11.385	1.185			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen					12	12	100
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Dokumen					12	12	100
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan penyelesaian keberatan	Wajib Pajak Daerah			7.133	7.186			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen					12	12	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan	Dokumen Laporan			2	2			
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen					2	2	100
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Triwulan untuk 3 Jenis Retribusi	Laporan Kegiatan			4	4			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan					4	4	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan					2	2	100

2.1.1 Uraian Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Belum tersedianya regulasi terkait pengadaan tenaga fungsional untuk pemungutan pajak daerah;
2. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi Perangkat Daerah pengelola pelayanan perizinan terkait potensi pajak daerah;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak daerah seperti Legal Drafter, Penilai PBB, Pemeriksa Pajak, Pemetaan, Juru Sita Pajak, dan lain-lain;
4. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM;
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik;
6. Belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak;
7. Pembayaran pajak belum tepat waktu dan tepat jumlah;
8. Belum akuratnya bank data sebagai dasar perhitungan potensi dan target pajak daerah;
9. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
10. Masih rendahnya collection ratio PBB Perdesaan dan Perkotaan;
11. Masih adanya pelaporan transaksi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan fakta;
12. Masih terdapatnya peralihan hak milik tercatat di BPN namun BPHTB tidak masuk ke kas daerah;
13. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok kabupaten Bogor;

14. Belum optimalnya pengelolaan dana transfer khususnya DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi oleh Perangkat Daerah Pengguna;
15. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah;
16. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah maupun instansi terkait lainnya;
17. Masih rendahnya kontribusi Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagai salah satu sumber peningkatan PAD selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Masih rendahnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam mendukung peningkatan PAD.

2.1.2 Uraian Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kabupaten Bogor;
2. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan mengoptimalkan pendataan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
3. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah untuk menghasilkan PAD.

2.1.3 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat melalui Inovasi Sistem Informasi (Implementasi Halo Bappenda, Pendistribusian SPPT Elektronik dan Pengembangan Intergrasi Data Pajak Daerah), Pelayanan Online dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pembayaran;
2. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui pemutakhiran data potensi pajak daerah;
3. Penerapan stimulus fiskal bagi wajib pajak;
4. Optimalisasi penerimaan piutang pajak daerah melalui pemutakhiran data piutang dan penagihan piutang;
5. Penerapan kebijakan pajak daerah bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido;
6. Penyiapan dan Penyempurnaan Produk Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi terkait dengan telah diundangkannya UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Meningkatkan kerjasama dengan : KPP & BPN (kaitan optimalisasi penerimaan BPHTB); kejaksaan (kaitan piutang PBB P2). BJB, BRI (kaitan setoran Pajak Daerah);
8. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kemendagri, Kemenkeu, Provinsi dan ESDM Provinsi;
9. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah dan peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) indikator sasaran dan 1 (satu) indikator tujuan tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama 91,66%. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2023 dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan renstra yaitu “**Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel**” dengan indikator **Rasio PAD** dengan target 47,21% terealisasi sebesar 41,72% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 88,37%. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka telah ditetapkan 1 (satu) **Indikator sasaran** yaitu :

1. **Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Efektif**, dengan indikator sasaran **a) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah** dengan target 47,37% terealisasi sebesar 41,72% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 88,07%, **b) Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah** dengan target 69,59% terealisasi sebesar 68,57% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 98,53% dengan program dan indikator capaian program sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator capaian program **a) Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD**, **b) Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD** .

Secara keseluruhan dari tahun 2019-2020 baik indikator tujuan dan sasaran telah mencapai bahkan melampaui target, hanya pada tahun 2020 untuk indikator sasaran hanya mencapai 99% (kemungkinan imbas dari kejadian luar biasa pandemi covid). Capaian IKU tujuan dan sasaran tahun 2022 mendekati angka 100% yakni realisasi mendekati ke angka target tetapi tidak mencapai target

dikarenakan targetnya menggunakan target pada dokumen RPJMD. Kemudian Pencapaian Kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 tidak mencapai 100% hal ini terjadi sama dengan seperti tahun 2022 dikarenakan targetnya tidak menyesuaikan target tahun berjalan melainkan targetnya menggunakan target RPJMD yang sudah disusun dari tahun 2021. Hasil analisis kinerja pelayanan disajikan dalam tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023, sebagaimana terlampir.

TABEL 2.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2023

URUSAN : **PENUNJANG**
BIDANG URUSAN : **KEUANGAN**
PERANGKAT DAERAH : **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	TAHUN 2019-2020								
	TUJUAN :								
1.	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel								
	INDIKATOR TUJUAN :								
a.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	38,89	36,72					
	SASARAN :								
1.	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas								
	INDIKATOR SASARAN :								
a.	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	106,24	98,80					
2.	Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif								

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	INDIKATOR SASARAN :								
b.	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	70,97	65,68					
	TAHUN 2021-2023								
	TUJUAN :								
1.	Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel								
	INDIKATOR TUJUAN :								
	Rasio PAD	%			40,89	41,33	47,21	41,43	87,75
	SASARAN :								
1.	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif								
	INDIKATOR SASARAN :								
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%			41,14	41,33	47,37	41,43	87,45
	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%			65,51	69,61	69,59	69,54	99,92

Berdasarkan tabel 2.3 untuk indikator tujuan target tahun 2023 sebesar 47,21% dan terealisasi sebesar 41,43% sehingga menghasilkan tingkat capaian realisasi sebesar 87,75%, hasil capaian berada di bawah angka 100% karena target menggunakan target pada dokumen RPJMD sama halnya dengan realisasi pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada indikator sasaran pada tingkat capaian realisasi yang tidak mencapai angka 100%. Jika dilihat perbandingannya realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023 berbeda, lebih tinggi angka realisasi pada tahun 2023, dikarenakan angka pendapatan lebih besar.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor, melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Masalah pokok yang dialami Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yaitu “Belum Optimalnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang

Efektif". Dapat dilihat di bawah ini masalah pelayanan yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi (juru sita pajak, arsiparis, pranata komputer, pemeriksa pajak, penilai pajak) dan kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) Belum adanya regulasi turunan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Belum Optimalnya Updating Data sebagai bahan penyusunan perencanaan target pendapatan daerah;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan pajak daerah;
- 5) Belum optimalnya tingkat pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Kinerja program yang perlu ditingkatkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah saja. penting juga dalam kaitan optimalisasi pendapatan asli daerah (pad), yakni konsistensi dalam penegakkan peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan peluang yang harus diselesaikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (better, faster, cheaper). Selain itu dengan adanya dinamika terhadap peraturan perundangundangan maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka memenuhi tantangan dan peluang tersebut. Berikut telah dirangkum sejumlah tantangan di bawah ini :

- 1) Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

- 2) Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
- 4) Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (better, faster, cheaper);
- 5) Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan good governance dan clean government seiring dengan agenda reformasi birokrasi;
- 6) Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi tantangan bagi Bappenda dalam pembentukan produk hukum pajak daerah sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut.

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, antara lain sebagai berikut:

- a) Padatnya penduduk dan mahalannya hunian di wilayah DKI Jakarta, mendorong pertumbuhan penduduk di daerah penyangga (*hinterland*) yaitu Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dengan meningkatnya infrastruktur dan sarana transportasi, Kabupaten satelit Ibu Kota menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat tinggal, sehingga hal itu berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Bogor;
- b) Kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan sanksi ketika tidak dijalankan, harus dilakukan penyusunan aturan yang memuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penegakan aturan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait;
- c) Tersedianya integrasi sistem sebagai sarana data informasi terpadu dan terpusat yang akurat, valid, dan cermat serta detil mengenai

objek pajak, Wajib Pajak serta data-data lain yang terkait dengan perpajakan bersinergi dengan data-data yang dimiliki/dibutuhkan oleh SKPD lainnya (Kependudukan, DPMTSP, BPN, Dinsos);

- d) Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT;
- e) Dibuatnya suatu sistem dengan menggunakan teknologi yang mempermudah dan mempercepat pembayaran, pengecekan & penelusuran pajak, baik bagi masyarakat sebagai pembayar pajak maupun pemerintah sebagai penerima pajak, bersinergi dengan bidang teknologi lainnya, seperti sistem pembayaran cashless, sistem cetak tagihan mandiri, *complain online robotic*.

Berangkat dari uraian di atas, maka isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi dan jumlah SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- 2) Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
- 3) Belum optimalnya integrasi sistem untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi perpajakan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada prioritas pembangunan yang ke 2 (dua), yaitu Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi. Berdasarkan hal-hal yang digariskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025,

penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan diarahkan kepada program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pada rancangan awal renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada di angka Rp. 303.471.134.822,- tetapi seiring berjalannya waktu penambahan ataupun pengurangan anggaran pun ikut berjalan dikarenakan adanya penambahan target juga ikut serta penambahan anggaran belanja guna untuk memenuhi pencapaian target.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor di dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2025) akan disusun sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang diperoleh berdasarkan penjaringan aspirasi melalui jalur partisipatif (Musrenbang kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, serta jalur perencanaan (teknokratik). Pada saat menyusun rancangan akhir RKPD tahun 2025 Bappenda mengampu **2 program, 9 kegiatan, dan 61 sub kegiatan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp 260.942.191.613 . Dari rancangan awal ke tahapan rancangan akhir Bappenda mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 42.528.943.209, tetapi tidak semua sub kegiatan mengalami penurunan, terdapat juga subsidi silang antar sub kegiatan. Adapun anggaran usulan tahun 2025 tersebut akan dipergunakan untuk tambahan kegiatan baru di Bappenda yaitu adanya *cost sharing* dari penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB, dengan rincian sebagai berikut:

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah terdapat anggaran sebesar Rp. 1.291.285.000,- guna untuk sosialisasi, publikasi dan exhibition kendaraan bermotor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terdapat anggaran sebesar Rp. 760.808.500,- untuk WA Blast dan pemasangan perangkat dan aplikasi blasting;

3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah terdapat anggaran sebesar Rp. 1.294.936.962,- untuk sensus kendaraan bermotor bekerjasama dengan BPS.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat anggaran sebesar Rp.4.800.000.000,- untuk pengadaan dan penyebaran unit layanan samsat digital mandiri;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.959.370.250,- untuk kendaraan operasional;

Secara keseluruhan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

URUSAN : PENUNJANG
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						303.471.134.822						260.942.191.613	
1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pajak Daerah	Rupiah	3.200.305.975.941	34.922.203.353	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pajak Daerah	Rupiah	3.200.305.975.941	31.503.736.598	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan	12				2. Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan	12		
			3. Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan	2				3. Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan	2		
			4. Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%	100				4. Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%	100		
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	16	459.952.764	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	16	373.430.254	
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	294.963.664	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	474.421.950	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	2.481.506.967	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	2.396.938.488	Anggaran cost sharing untuk sosialisasi, publikasi, dan exhibition kendaraan bermotor
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.644.923.345	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.744.220.133	Penambahan anggaran cost sharing, untuk pengintegrasian data
	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	5.089.307.448	5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	3.046.979.872	Anggaran cost sharing, untuk penelusuran penunggak PKB, Operasi gabungan (KTMDU), dan Operasi Khusus (KTMDU)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Laporan	2	46.940.290			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Laporan	2	54.630.966	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Laporan	2	40.426.713			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Laporan	2	68.154.273	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Laporan	2	39.918.668			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Laporan	2	40.548.639	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Parung)	Laporan	2	36.166.972			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Parung)	Laporan	2	83.806.354	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Laporan	2	84.892.286			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Laporan	2	136.653.487	
			Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Laporan	2	49.604.693			Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Laporan	2	60.822.192	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Laporan	2	61.337.401			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Laporan	2	74.691.590	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Laporan	2	56.466.474			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Laporan	2	35.751.712	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Laporan	2	150.170.255			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Laporan	2	131.936.947	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Laporan	2	122.917.069			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Laporan	2	99.674.737	
	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	768.696.304	6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	717.172.047	
	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappen da	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.439	759.556.381	7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappen da	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.439	700.058.406	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.607.816.061	8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.253.793.247	
	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	210.000	2.321.217.903	9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	210.000	2.069.829.359	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	176.298.805			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	173.866.832	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	118.178.192			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	238.468.908	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	163.063.227			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	126.614.393	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	290.591.317			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	183.800.145	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	144.193.277			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	143.610.087	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	116.798.791			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	280.285.903	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	168.784.943			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	228.316.770	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	65.870.310			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	165.152.761	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	196.952.884			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	179.774.475	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	246.696.053			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	218.001.932	
	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	90.000	931.887.124	10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	90.000	735.395.538	
	11. Penagihan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.590	2.633.470.069	11. Penagihan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.590	2.098.477.538	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Dokumen	12	759.884.768			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Dokumen	12	756.994.744	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Dokumen	12	783.008.085			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Dokumen	12	791.640.300	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Dokumen	12	1.010.369.308			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Dokumen	12	958.265.905	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Parung)	Dokumen	12	1.405.225.923			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Parung)	Dokumen	12	1.382.289.073	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Dokumen	12	988.713.082			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Dokumen	12	1.075.434.563	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Caringin)	Dokumen	12	882.924.429			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Caringin)	Dokumen	12	824.142.471	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Dokumen	12	1.072.667.672			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Dokumen	12	1.076.054.980	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Dokumen	12	1.159.294.045			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Dokumen	12	1.185.587.316	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Dokumen	12	1.131.475.080			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Dokumen	12	1.177.583.567	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Dokumen	12	1.336.603.258			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Dokumen	12	1.220.783.445	
	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		947.403.111	12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		966.481.098	
	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25	1.314.384.457	13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25	1.230.510.770	
	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	621.054.680	14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	161.185.807	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	139.628.805	15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	361.502.624	
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase		268.548.931.468	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase		229.438.455.015	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	1.488.686.858	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	1.630.632.862	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	187.519.024	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	198.601.540	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	130.967.920	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	198.542.081	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	159.177.874	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	147.740.432	
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	115.564.589	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	167.428.703	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	184.035.373	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	179.980.699	
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	112.243.354	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	140.884.064	
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	499.178.724	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappen da	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	505.704.296	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8. Ewalidata					100.000.000	8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	91.751.047	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	215.649.849.460	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	181.824.526.449	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappen da	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	183/12	214.473.402.900	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappen da	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	183/12	180.654.615.422	
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1100	778.193.956	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.100	626.449.854	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	109.228.455	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappen da	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	104.968.679	
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	73.520.843	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	139.643.767	
	5. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappen da	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3		5. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappen da	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	120.387.011	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	171.816.860	
	7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	95.116.295	7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	127.031.867	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	2.837.702.792	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	1.903.225.899	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappen da	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	127.926.013	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappen da	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	80.419.500	
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappen da	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	288.461.250	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappen da	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	302.475.000	
	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappen da	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	700.871.403	3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappen da	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	776.614.101	
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	251.613.082	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappen da	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	170.550.969	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappen da	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	349.162.620	5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappen da	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	141.021.616	
	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappen da	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	207.900.000	9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappen da	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	123.000.000	
	10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappen da	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	185	566.089.562	10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappen da	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	185	140.825.061	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappen da	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	345.678.862	11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappen da	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	168.319.652	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%	100	8.509.604.936	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%	100	9.413.002.914	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappen da	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	194.038.384	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappen da	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	185.228.865	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappen da	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4.832.741.088	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappen da	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5.728.814.868	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	2	8.978.393			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	2	13.507.785	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	2	10.482.682			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	2	11.110.934	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	2	9.454.478			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	2	9.505.766	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	2	18.324.399			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	2	13.992.521	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	2	9.543.697			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	2	9.483.230	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	2	17.544.680			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	2	14.156.776	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	2	4.445.130			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	2	11.791.892	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	2	10.495.677			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	2	22.286.247	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	2	16.428.597			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	2	24.010.717	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	2	15.671.906			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	2	21.181.132	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappen da	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	208.712.312	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappen da	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	211.891.397	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	7.568.600			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	8.480.345	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	10.449.873			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	15.071.720	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	3.247.958			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	6.196.105	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	10.475.215			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	10.409.999	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	6.574.644			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	5.098.287	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	9.210.830			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	10.855.539	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	8.923.301			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	8.477.099	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	9.204.303			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	22.502.741	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	8.176.216			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	9.803.410	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	15.213.891			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	14.258.950	
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappen da	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	921.399.654	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappen da	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	704.718.475	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappen da	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	205.911.507	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappen da	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	152.969.100	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	5.197.500			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	4.790.982	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	3.496.500			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	10.797.500	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	5.594.400			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	1.996.890	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	5.509.350			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	1.999.998	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	7.124.119			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	5.550.111	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	10.489.500			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	9.989.889	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	5.594.400			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	6.993.000	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	3.496.500			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	2.530.850	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	8.741.250			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	8.974.350	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	9.909.900			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	8.099.700	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappen da	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	163.800.000	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappen da	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappen da	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	397.005.000	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappen da	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	153.180.000	
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	588.630.000	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1.124.360.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	2	76.356.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	2	47.295.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	2	45.444.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	2	38.115.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	2	36.792.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	2	35.586.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	2	55.188.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	2	56.385.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	2	47.817.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	2	38.960.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	2	32.970.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	2	49.310.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	2	36.088.500			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	2	41.280.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	2	52.920.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	2	28.145.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	2	45.696.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	2	29.120.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	2	81.102.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	2	69.320.000	
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	211.425.603	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	394.419.244	
	10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					950.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					224.657.042	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappen da	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	150.000.000	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappen da	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	76.038.193	
	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	800.000.000	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappen da	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	148.618.849	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	27.718.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	23.435.191.267	
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappen da	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	890.000.000	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappen da	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappen da	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	6.025.000.000	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappen da	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	10.964.111.580	Penambahan anggaran cost sharing, untuk kendaraan operasional dan sewa mobil operasional
	3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappen da	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-		3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappen da	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-		
	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16.079.700.000	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	11.283.579.687	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	3.326.000.000	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	262.500.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	221.550.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	221.000.000	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	315.000.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	175.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	210.000.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	200.000.000	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Unit	1				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Unit	1	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	178.500.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	181.500.000	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	210.000.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	160.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	5.733.366.033	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	7.115.332.882	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappen da	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3.380.028.750	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappen da	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3.657.600.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	45.357.732			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	55.231.800	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	69.300.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	67.499.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	36.200.714			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	41.856.800	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	37.800.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	44.700.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	17.635.527			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	16.795.740	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	23.654.400			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	26.128.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	66.141.731			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	86.400.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	28.350.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	97.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	46.620.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	35.997.200	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	50.400.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	55.200.000	
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	1	9.922.500			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	1	7.050.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	1	9.733.500			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	1	9.300.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	1	9.213.750			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	1	9.000.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	1	2.362.500			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	1	2.250.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	1	9.450.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	1	5.250.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	1	9.702.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	1	9.240.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	1	10.237.500			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	1	9.750.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	1	9.371.250			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	1	18.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	1	10.290.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	1	17.454.750	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	1	9.765.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	1	9.690.000	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappen da	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	735.738.961	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappen da	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.312.572.552	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	154.366.704	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	129.067.407			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	256.077.840	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	188.322.272	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	101.711.136	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	101.711.136	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	101.711.136	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	132.847.407			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	207.022.272	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	180.694.488	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	128.038.920	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	105.521.926			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	101.711.136	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	5.661.471.390	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	3.891.885.700	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappen da	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	128.625.000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappen da	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	171.180.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappen da	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	1.033.500.000	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappen da	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	1.185.700.000	Adanya pengurangan pemeliharaan kendaraan operasional dikarenakan kendaraan operasional untuk tahun 2025 sewa sehingga tidak perlu pemeliharaan
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappen da	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.416.985.500	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappen da	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	827.079.700	
	4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappen da	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	210.000.000	4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappen da	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.421.764.890	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	770.562.000	
	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.450.596.000	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappen da	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	912.364.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini hasil kajian terhadap usulan program/kegiatan/sub kegiatan, khususnya dari Bappenda tidak terdapat yang bersumber dari masyarakat, dituangkan pada tabel 2.5 dengan format sebagaimana terlampir.

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN BOGOR

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PERANGKAT DAERAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2024 diselaraskan dengan Renja Pusat dan Renja Provinsi Jawa Barat. Adapun keterkaitan kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPN 2005-2025, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan nasional. Pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyedia infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing bangsa dalam setiap aspek pembangunan.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagaimana terlampir tabel 3.1 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.

TABEL 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pajak Daerah	Pajak Daerah	3.200.305.975.941	Rupiah	260.942.191.613

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025, sebagaimana terlampir tabel 3.2 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025.

TABEL 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pajak Daerah	Pajak Daerah	3.200.305.975.941	Rupiah	260.942.191.613

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur Pengelola Pajak Daerah 2. Menyusun regulasi yang berpedoman terhadap implementasi UU nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya 3. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah 4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah 5. Pengembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah 6. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah - Subid Perencanaan - Subid Pengembangan - Subid Pengelolaan Sistem Informasi 2. Bidang Pendataan dan Penilaian - Subid Pendataan - Subid Penilaian - Subid Pengolahan Data 3. Bidang Pelayanan dan Penetapan - Subid Pelayanan - Subid Verifikasi - Subid Penetapan 4. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan - Subid Penagihan - Subid Keberatan - Subid Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat - Subag Program dan Pelaporan - Subag Keuangan - Subag Umum dan Kepegawaian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu:

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

Pernyataan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan ditarik berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu semakin meningkat PAD suatu daerah maka diharapkan semakin meningkat kemandirian daerahnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja

Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- c. Sasaran memenuhi kriteria kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD = $\frac{\text{Total Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Total PAD}}$

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN					
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		PAD	Jumlah PAD	4.284.973.108.879	Rupiah
SASARAN					
Meningkatnya Pajak Daerah		Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Target Pajak Daerah/ Target PAD * 100%	74,69	Persentase

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masuk ke dalam Urusan Penunjang, bidang Urusan Keuangan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercantum dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri

90 Tahun 2019, terdiri dari 1 (satu) Program Utama, 1 (satu) Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator program :

- Pajak Daerah, dengan target Rp.3.200.305.975.941,00 ;

Jumlah kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya 1 kegiatan yaitu **“Pengolaan Pendapatan Daerah”** dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan target 12 Laporan;
- Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah, dengan target 12 Laporan;
- Laporan potensi dan basis data pajak daerah, dengan target 2 Laporan;
- Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih, dengan target 100%.

Berikut rincian 15 Sub Kegiatan di bawah ini :

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah;

6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan indikator Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya;
8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah;
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi;
11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah;
12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah;
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
15. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Sedangkan Program Penunjang yaitu **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”** dengan 8 (delapan) kegiatan (1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

(6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berdasarkan PMDN No.90 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

TABEL 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Sekretariat				
Sub Bag Program dan Pelaporan	1	1	8	1.630.632.862
Sub Bag Keuangan	1	1	7	181.824.526.449
Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	6	35	41.893.214.409
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah				
Sub Bidang Perencanaan	1	1	2	734.932.878
Sub Bidang Pengembangan	1	1	2	2.871.360.438
Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	1	1	1	1.744.220.133
Bidang Pendataan dan Penilaian				
Sub Bidang Pendataan	1	1	1	3.046.979.872
Sub Bidang Penilaian	1	1	1	700.058.406
Sub Bidang Pengolahan Data	1	1	1	717.172.047
Bidang Pelayanan dan Penetapan				
Sub Bidang Penetapan	1	1	1	1.253.793.247
Sub Bidang Pelayanan	1	1	1	2.069.829.359
Sub Bidang Verifikasi	1	1	1	735.395.538
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan				
Sub Bidang Penagihan	1	1	1	2.098.477.538
Sub Bidang Keberatan	1	1	1	966.481.098
Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah	1	1	2	1.391.696.577
UPT Pajak Daerah	2	4	11	17.263.420.762

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen rencana perangkat daerah. Renja Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pada Tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan melaksanakan 1 (satu) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang. Program Utama diturunkan ke dalam indikasi Kegiatan yang hanya berjumlah 1 (satu) Kegiatan, dan diturunkan ke dalam sub Kegiatan yang berjumlah 15 (lima belas) sub Kegiatan, masing-masing sub Kegiatan diberikan dukungan pendanaan yang masih bersifat indikatif yang bersumber dari APBD. Sedangkan untuk Program Penunjang diturunkan ke dalam indikasi Kegiatan yang hanya berjumlah 8 (delapan) Kegiatan. Secara keseluruhan, pagu indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebesar Rp. 260.942.191.613,00 .

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

URUSAN / UNSUR : PENUNJANG
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						260.942.191.613				274.703.411.300
1	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pajak Daerah	Rupiah	3.200.305.975 .941	31.503.736.598			3.200.305.975.94 1	33.078.923.428
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12	31.503.736.598			12	33.078.923.428
			2. Laporan Pelayanan Pendapatan Daerah	Laporan	12				12	
			3. Laporan potensi dan basis data pajak daerah	Laporan	2				2	
			4. Persentase Jumlah Piutang yang Tertagih	%	100				100	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	16	373.430.254	Bappenda		16	392.101.767
		2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	474.421.950	Bappenda		12	498.143.048
		3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	2.396.938.488	Bappenda		12	2.516.785.412
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.744.220.133	Bappenda		3	1.831.431.140
		5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	3.046.979.872	Bappenda		12	3.199.328.866
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Laporan	2	54.630.966			2	57.362.514

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Laporan	2	68.154.273			2	71.561.987
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Laporan	2	40.548.639			2	42.576.071
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Parung)	Laporan	2	83.806.354			2	87.996.672
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Laporan	2	136.653.487			2	143.486.161
			Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Laporan	2	60.822.192			2	63.863.302

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Laporan	2	74.691.590			2	78.426.170
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Laporan	2	35.751.712			2	37.539.298
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Laporan	2	131.936.947			2	138.533.794
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Laporan	2	99.674.737			2	104.658.474
		6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	717.172.047	Bappenda		12	753.030.649

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.439	700.058.406	Bappenda		19	735.061.326
		8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.253.793.247	Bappenda		12	1.316.482.909
		9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	200.000	2.069.829.359	Bappenda		200.000	2.173.320.827
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	173.866.832			4.800	182.560.174
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	238.468.908			2.400	250.392.353
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	126.614.393			2.100	132.945.113
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	183.800.145			1.680	192.990.152
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	143.610.087			3.600	150.790.591

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	280.285.903			210	294.300.198
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	228.316.770			1.644	239.732.609
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	165.152.761			850	173.410.399
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	179.774.475			1.400	188.763.199
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	218.001.932			6.300	228.902.029
		10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	90.000	735.395.538	Bappenda		90.000	772.165.315
		11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5	2.098.477.538	Bappenda		5	2.203.401.415
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Dokumen	5	756.994.744			5	794.844.481

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Dokumen	5	791.640.300			5	831.222.315
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Dokumen	5	958.265.905			5	1.006.179.200
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Parung)	Dokumen	5	1.382.289.073			5	1.451.403.527
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Dokumen	5	1.075.434.563			5	1.129.206.291
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Caringin)	Dokumen	5	824.142.471			5	865.349.595
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Dokumen	5	1.076.054.980			5	1.129.857.729
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Dokumen	5	1.185.587.316			5	1.244.866.682

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Dokumen	5	1.177.583.567			5	1.236.462.745
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Dokumen	5	1.220.783.445			5	1.281.822.617
		12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	966.481.098	Bappenda		12	1.014.805.153
		13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.230.510.770	Bappenda		12	1.292.036.309
		14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	161.185.807	Bappenda		4	169.245.097
		15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	361.502.624	Bappenda		2	379.577.755
										-
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase		229.438.455.015				241.624.487.872

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	17	1.630.632.862			17	1.712.164.505
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	198.601.540	Bappenda		4	208.531.617
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	198.542.081	Bappenda		1	208.469.185
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	147.740.432	Bappenda		1	155.127.454
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	167.428.703	Bappenda		2	175.800.138
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	179.980.699	Bappenda		2	188.979.734

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	140.884.064	Bappenda		4	147.928.267
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	505.704.296	Bappenda		4	530.989.511
		8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	91.751.047	Bappenda		1	96.338.599
										0
										0
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	181.824.526.449			100	190.915.752.771
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	183/12	180.654.615.422	Bappenda		175/12	189.687.346.193
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1100	626.449.854	Bappenda		1.930	657.772.347

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	104.968.679	Bappenda		12	110.217.113
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	139.643.767	Bappenda		1	146.625.955
		5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3		Bappenda		3	-
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	171.816.860	Bappenda		36	180.407.703
		7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	127.031.867	Bappenda		1	133.383.460

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	1.903.225.899			100	1.998.387.194
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	80.419.500	Bappenda		500	84.440.475
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	302.475.000	Bappenda		100	317.598.750
		3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	776.614.101	Bappenda		12	815.444.806
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	170.550.969	Bappenda		12	179.078.517
		5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	141.021.616	Bappenda		12	148.072.697
		6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	123.000.000	Bappenda		2 7	129.150.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	185	140.825.061	Bappenda		200	147.866.314
		8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	168.319.652	Bappenda		200	176.735.635
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%	100	9.413.002.914			100	9.883.653.060
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	185.228.865	Bappenda		1	194.490.308
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5.728.814.868	Bappenda		6	6.015.255.611
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	2	13.507.785			2	14.183.174

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	2	11.110.934			2	11.666.481
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	2	9.505.766			2	9.981.054
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	2	13.992.521			2	14.692.147
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	2	9.483.230			2	9.957.392
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	2	14.156.776			2	14.864.615

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	2	11.791.892			2	12.381.487
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	2	22.286.247			2	23.400.559
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	2	24.010.717			2	25.211.253
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	2	21.181.132			2	22.240.189
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	211.891.397	Bappenda		1	222.485.967
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	8.480.345			1	8.904.362

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	15.071.720			1	15.825.306
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	6.196.105			1	6.505.910
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	10.409.999			1	10.930.499
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	5.098.287			1	5.353.201
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	10.855.539			1	11.398.316
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	8.477.099			1	8.900.954

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	22.502.741			1	23.627.878
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	9.803.410			1	10.293.581
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	14.258.950			1	14.971.898
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	704.718.475	Bappenda		6	739.954.399
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	152.969.100	Bappenda		6	160.617.555
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	4.790.982			6	5.030.531

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	10.797.500			6	11.337.375
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	1.996.890			6	2.096.735
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	1.999.998			6	2.099.998
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	5.550.111			6	5.827.617
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	9.989.889			6	10.489.383

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	6.993.000			6	7.342.650
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	2.530.850			6	2.657.393
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	8.974.350			6	9.423.068
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	8.099.700			6	8.504.685
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		Bappenda		1	-
		7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	2	153.180.000	Bappenda		11	160.839.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1.124.360.000	Bappenda		12	1.180.578.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	2	47.295.000			12	49.659.750
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	2	38.115.000			12	40.020.750
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	2	35.586.500			12	37.365.825
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	2	56.385.000			12	59.204.250

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	2	38.960.000			12	40.908.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	2	49.310.000			12	51.775.500
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	2	41.280.000			12	43.344.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	2	28.145.000			12	29.552.250
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	2	29.120.000			12	30.576.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	2	69.320.000			12	72.786.000
		9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	394.419.244	Bappenda		12	414.140.206
		10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-		Bappenda		-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					224.657.042				950.000.000
		1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	76.038.193	Bappenda	APBD	1	150.000.000
		2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	148.618.849	Bappenda	APBD	12	800.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%	100	23.435.191.267			100	24.606.950.830
		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-		Bappenda		-	-
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	10.964.111.580	Bappenda		-	11.512.317.159
		3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-		Bappenda		-	-
		4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	11.283.579.687	Bappenda		2	11.847.758.671
		5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		Bappenda		-	-
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	250.000.000			1	262.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	221.000.000			1	232.050.000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	175.000.000			1	183.750.000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	200.000.000			1	210.000.000
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	181.500.000			1	190.575.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	160.000.000			1	168.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah terlaksana dengan baik	%	100	7.115.332.882			100	7.471.099.526
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3.657.600.000	Bappenda		12	3.840.480.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	55.231.800			12	57.993.390
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	67.499.000			12	70.873.950

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	41.856.800			12	43.949.640
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	44.700.000			12	46.935.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	16.795.740			12	17.635.527
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	26.128.000			12	27.434.400

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	86.400.000			12	90.720.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	97.000.000			12	101.850.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	35.997.200			12	37.797.060
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	55.200.000			12	57.960.000
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Bappenda			-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	1	7.050.000			1	7.402.500
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	1	9.300.000			1	9.765.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	1	9.000.000			1	9.450.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	1	2.250.000			1	2.362.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	1	5.250.000			1	5.512.500
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	1	9.240.000			1	9.702.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	1	9.750.000			1	10.237.500
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	1	18.000.000			1	18.900.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	1	17.454.750			1	18.327.488
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	1	9.690.000			1	10.174.500
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.312.572.552	Bappenda		12	1.378.201.180
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	154.366.704			12	162.085.039

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	256.077.840			12	268.881.732
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	188.322.272			12	197.738.386
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	101.711.136			12	106.796.693
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	101.711.136			12	106.796.693

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	101.711.136			12	106.796.693
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	207.022.272			12	217.373.386
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	180.694.488			12	189.729.212
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	128.038.920			12	134.440.866

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	101.711.136			12	106.796.693
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	3.891.885.700			100	4.086.479.985
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	171.180.000	Bappenda		9	179.739.000
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	140	1.185.700.000	Bappenda		110	1.244.985.000
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	827.079.700	Bappenda		5	868.433.685
		4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	Bappenda		1	26.250.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	770.562.000	Bappenda		4	809.090.100
		6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	912.364.000	Bappenda		2	957.982.200
										-
										0

BAB V

P E N U T U P

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2025 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang Tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pj. BUPATI BOGOR,



ASMAWA